

ABSTRAK

A. Rezki Tenri Uleng, “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba).”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba) dengan mengacu pada indikator pengawasan yaitu pengawasan eksternal, pengawasan internal, pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Anrihua mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Desa Anrihua yang melaksanakan program bantuan langsung tunai (BLT) dengan maksud untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (2) penerima BLT yang telah terindikasi berjumlah 39 dari periode tahun 2023. Penentuan masyarakat yang menerima BLT ditentukan berdasarkan mufakat BPD Desa Anrihua dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan data sekunder yang tercantum dalam peraturan Kepala Desa Anrihua (PP KEPDES Anrihua, 2023) tentang penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa program bantuan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem. (3) Pengamatan BPD terhadap penyaluran BLT desa tahun 2023 Pemerintah Desa dan masyarakat Anrihua memiliki kecenderungan masih ada kendala-kendala teknis karena tidak ada mekanisme yang dijadikan acuan BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam penyaluran BLT desa baik itu dari Pemerintah Desa maupun masyarakat (4) Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas fungsional kinerja pemerintah Desa kurang optimal dalam melaksanakan fungsinya terkhusus dalam melaksanakan program penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Anrihua dikarenakan keterbatasan tindakan pengawasan yang dibatasi peraturan yang ada.

Kata Kunci: *BPD, Pengawasan, Bantuan langsung Tunai*